

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI
KECAMATAN BREBES



Amaliah Chairunnisa, Endang Larasati, Dyah Lituhayu

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The stunting control policy is a policy from the government to create a superior generation, because the stunting problem is an important issue that must be solved because it has an impact on the quality of human resources in the future. This study aims to analyze the implementation of stunting control policies in Brebes District, by analyzing the inhibiting factors in the implementation of stunting control policies in Brebes District. This policy is based on Regent Regulation Number 50 of 2019 concerning Stunting Control. In the stunting control policy, there is the First Thousand Days of Life (HPK) program, the Healthy Living Community Movement (Germas), family independence and nutrition education. This research method uses descriptive qualitative using the policy implementation theory put forward by Van Meter and Van Horn from the aspect; policy standards and objectives, resources, inter-organization relations, characteristics of implementing agents, dispositions and conditions of the social, economic and political environment. This study uses primary data through interviews with informants and secondary data obtained through other sources. The results of the study show that policy implementers have carried out their duties well, ranging from nutrition counseling to intervention programs. However, there is still a significant challenge, namely low public awareness of the importance of stunting prevention, even though campaigns and socialization have been carried out. In addition, another obstacle faced is that the legal framework used still refers to laws that have not been updated, so it does not fully support the change in needs on the ground.

Keywords: *Implementation, Countermeasure Policy, Stunting.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan kesehatan adalah proses penting dalam pembangunan nasional, pembangunan nasional yang merupakan bentuk dari upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat supaya dapat terpenuhi dimasa yang akan datang. Kualitas sumber daya manusia (*human*

capital) berperan penting dalam meningkatkan taraf pembangunan kesehatan, manusia memiliki modal indeks (*Human Capital Index*) sebagai parameter, yaitu pada bidang kesehatan diukur melalui survival rate usia 15-60 tahun dan proporsi anak yang tidak mengalami stunting dibawah usia 5 tahun (Friska, e. & Putri, d. 2022).

Menurut WHO (2015), stunting merupakan kekurangan gizi dan infeksi berulang yang mengakibatkan terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini adalah masalah kesehatan global yang memengaruhi banyak negara, terutama di negara berkembang yang menghambat upaya pembangunan manusia. Terdapat 4 fase kehidupan yang dapat memicu terjadinya stunting hal ini didasarkan pada kategori patologis atau tidak penyebabnya. Fase ini dikenal dengan “Window of Opportunity” dalam kejadian stunting. Dimulai 3 dengan fase kehamilan (janin), fase bayi sampai usia 2 tahun, fase kanak-kanak dan fase pubertas (remaja).

Prevalensi Stunting di Indonesia

No.	Tahun	Persentase
1.	2019	27,7%
2.	2020	26,92%
3.	2021	24,4%
4.	2022	21,6%
5.	2023	21,5%

Sumber: Kementerian Kesehatan.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa prevalensi stunting Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan, akan tetapi, jumlah stunting di Indonesia masih tergolong mengkhawatirkan karena masih belum mencapai target yang ditentukan secara global pada angka 20% atau target nasional

pada angka 14%, sehingga dapat dikatakan bahwa stunting masih menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat yang baik di Indonesia.

Indonesia menetapkan percepatan penurunan angka stunting sebagai program prioritas nasional oleh pemerintah. Program tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting. Pemerintah meyakini bahwa angka stunting harus diturunkan lebih cepat guna meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta tercapainya 2 tujuan dari SDGs, yaitu mengakhiri kelaparan, mewujudkan ketahanan gizi dan pangan yang baik, serta memperluas pertanian berkelanjutan.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu dari kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang menjadi prioritas pelaksanaan intervensi kebijakan untuk menekan angka stunting dengan prevalensi tertinggi pada tahun 2022. Keputusan ini diambil berdasarkan indikator dari prevalensi stunting, tingkat kemiskinan, dan jumlah balita yang mengidap stunting. Prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Brebes memiliki faktor yang mempengaruhi determinan, antara lain faktor sosial ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan gizi.

**Stunting Setiap Kecamatan di
Kabupaten Brebes**

No.	Kecamatan	Stunting
1	Brebes	550
2	Salem	472
3	Bantarkawung	647
4	Bumiayu	756
5	Paguyangan	1.031
6	Sirampong	522
7	Tonjong	633
8	Larangan	719
9	Ketanggungan	566
10	Banjarharjo	1.039
11	Losari	835
12	Tanjung	883
13	Kersana	416
14	Bulakamba	1.404
15	Wanasari	455
16	Songgom	309
17	Jatibarang	490

Sumber : Dinas Kesehatan Brebes.

Tabel di atas menunjukkan prevalensi stunting di masing-masing kecamatan di Kabupaten Brebes, dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Bulakamba sebesar 1.404 dan Kecamatan Brebes sendiri memiliki penderita stunting sebesar 550 yang menunjukkan bahwa angka tersebut masih tergolong tingginya stunting di kecamatan berkontribusi signifikan terhadap angka stunting di tingkat kabupaten. Lokasi Kecamatan Brebes terletak di pusat kota yang seharusnya memiliki akses lebih baik ke berbagai sumber daya, masih terdapat angka stunting yang signifikan di wilayah ini. Keberadaan stunting di area yang lebih urban dan memiliki infrastruktur lebih baik menunjukkan bahwa masalah kekurangan

gizi kronis tidak hanya terkait dengan lokasi geografis, tetapi juga dengan faktor-faktor lain seperti ketidakmerataan distribusi sumber daya, kesenjangan informasi mengenai nutrisi, dan masalah ekonomi yang mempengaruhi kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.

**Persentase Balita Stunting Kecamatan
Brebes Tahun 2019-2022**

Tahun	Jumlah Balita	Jumlah Stunting	Persentase
2019	3.060	566	18,49%
2020	2.869	552	19,24%
2021	2.746	349	12,70%
2022	2.682	550	20,50%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Brebes

Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi yang kronis selama periode kritis pertumbuhan anak, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan (mulai dari masa kehamilan hingga usia 2 tahun). Selain itu Kondisi lingkungan yang menjadi intervensi sensitif adanya stunting karena akses terhadap air yang dikonsumsi dan sanitasi yang buruk, lingkungan yang kurang higienis, serta kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai dapat memperburuk masalah gizi sehingga meningkatkan risiko stunting pada anak-anak. Kondisi juga kemiskinan memiliki dampak dalam keterbatasan akses

terhadap sumber daya yang esensial guna pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pendidikan dan nutrisi yang mereka peroleh.

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes berupaya menekan permasalahan stunting di seluruh wilayah termasuk Kecamatan Brebes dengan mengeluarkan kebijakan penanggulangan stunting dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting melalui program Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), Edukasi Gizi, Gerakan Hidup Sehat Masyarakat, dan Kemandirian Keluarga.

Mengingat stunting telah menjadi prioritas pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Brebes terus berupaya untuk menurunkan angka stunting. Artinya, penurunan angka stunting harus mencapai level nasional. Untuk menurunkan angka stunting di Kecamatan Brebes, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berbagai lapisan masyarakat bahu membahu untuk mewujudkannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan melakukan mengetahui sejauh mana peraturan Pemerintah Kabupaten Brebes dilaksanakan dalam penurunan angka stunting yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kecamatan Brebes.

Pertanyaan Penelitian: Mengapa Penderita Stunting di Kecamatan Brebes masih tergolong tinggi?.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis mengenai implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kecamatan Brebes.
2. Menganalisis faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kecamatan Brebes.

KAJIAN TEORI

A. Administrasi Publik

Administrasi publik dicirikan sebagai gabungan kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan memahami hubungan antara pemerintah dan masyarakat untuk mempromosikan kebijakan publik yang lebih efektif mengatasi kebutuhan masyarakat. Menurut Pasolong (2011), Nicholas Henry.

Berdasarkan sudut pandang tersebut, administrasi publik adalah proses pengalokasian sumber daya sekelompok orang atau lembaga untuk penyelesaian masalah masyarakat secara efektif dan efisien, sekaligus melayani kebutuhan masyarakat. Administrasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah berfungsi sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif

dan selalu mengambil alih kekuasaan inisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah-langkah dan inisiatif yang dianggapnya penting atau baik bagi masyarakat.

B. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil sebagai respons terhadap keputusan sebelumnya, yang mencakup berbagai kegiatan individu, pejabat pemerintah, atau pihak swasta untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bertujuan menerjemahkan keputusan kebijakan ke 45 dalam tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, dalam rangkaian upaya untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil, yang diharapkan melalui keputusan kebijakan yang dijalankan oleh organisasi publik. (dalam Budi Winarno, 2008:146). Implementasi kebijakan hanya dapat dimulai setelah tujuan dan sasaran ditentukan melalui keputusan kebijakan. Dengan demikian, implementasi merupakan rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh berbagai aktor dan pihak terkait untuk mencapai hasil yang diharapkan guna mewujudkan tujuan atau sasaran kebijakan tersebut.

Terkait implementasi kebijakan berbagai ahli mengemukakan berbagai teori, dalam penelitian ini menggunakan teori

yang dikemukakan oleh Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dengan indikator yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan.

Agar dapat tercapai, standar dan tujuan kebijakan harus tepat dan terukur. Standar dan target kebijakan yang tidak jelas dapat menimbulkan berbagai penafsiran dan akibatnya, konflik di antara para pelaksana.

2. Sumberdaya.

Menilai ketersediaan dan alokasi sumber daya, termasuk dana, tenaga kerja, dan infrastruktur. Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Komunikasi antar Organisasi.

komunikasi bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling mendukung di antara berbagai aktor yang terlibat.

4. Karakteristik agen pelaksana.

Struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan yang ada dalam birokrasi semuanya dianggap sebagai karakteristik agen pelaksana dan akan berdampak pada bagaimana suatu program diimplementasikan.

5. Disposisi atau Sikap para pelaksana.

Kualitas pelaksana, seperti dedikasi, integritas, dan demokrasi. Pelaksana

kebijakan akan mempengaruhi kemauannya kognisi untuk menerapkan kebijakan, yaitu preferensi nilai seseorang oleh pelaksana.

6. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.

situasi ekonomi masyarakat selaku sasaran sehubungan dengan program atau kebijakan pemerintah, tingkat dukungan yang diberikan oleh sasaran selama fase implementasi kebijakan, ketersediaan lingkungan ekonomi, reaksi publik terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan, dan reaksi lingkungan politik terhadap kebijakan tersebut.

C. Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya dan menyebabkan pertumbuhannya terhambat. Gizi buruk jangka panjang disebabkan oleh masalah gizi yang terus menerus. Stunting menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia karena tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik tetapi juga membuat anak lebih rentan terhadap penyakit dan menyebabkan kelainan pada perkembangan otak dan kecerdasan. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2017), anak dapat menunjukkan gejala atau ciri-ciri yang mengindikasikan

terjadinya stunting. Gejala atau ciri-ciri tersebut antara lain:

1. pertumbuhan gigi terhambat;
2. pertumbuhan terhambat;
3. tanda-tanda pubertas terlambat;
4. hasil tes perhatian dan daya ingat belajar yang buruk;
5. anak menjadi lebih pendiam dan jarang melakukan kontak mata pada usia 8–10 tahun; dan
6. wajah tampak lebih muda dari usianya.

Dengan tujuan agar dapat menurunkan angka prevalensi stunting. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting terdapat 4 strategi penurunan stunting, yaitu :

1. Kemandirian Keluarga.
Kemampuan sebuah keluarga untuk bertindak secara mandiri mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah stunting pada anak-anak mereka dengan melibatkan pemahaman tentang gizi yang baik dan praktik kesehatan anak yang tepat.
2. Gerakan Masyarakat Sehat.
Inisiatif pemerintah dan masyarakat dengan tujuan untuk mendorong masyarakat menjalani pola hidup sehat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui

berbagai aktifitas yang mendukung kesehatan dan mencegah penyakit.

3. Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Tindakan dalam dunia kesehatan yang terfokus pada periode krisis sejak awal kehamilan hingga anak berusia dua tahun, dalam periode ini sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di mana intervensi gizi akan kesehatan yang tepat dapat memberikan dampak yang signifikan pada kualitas hidup anak.

4. Edukasi Gizi.

program dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terutama orang tua, mengenai pentingnya asupan nutrisi yang cukup dan seimbang bagi tumbuh kembang anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kecamatan Brebes. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Baperlitbangda Kabupaten Brebes, Dinas DP3KB, Dinas Kesehatan, Kepala Camat Kecamatan Brebes,

Puskesmas Kecamatan Brebes, dan orang tua balita stunting, dipilih menggunakan teknik *purpose sampling*.

Jenis data yang digunakan kualitatif yang diungkap secara verbal bersumber dari data primer yang berasal dari observasi langsung dan data sekunder yang bersumber dari proyek penelitian sebelumnya melalui jurnal, laporan, buku dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu : wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan menggunakan pendekatan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kecamatan Brebes

1. Kemandirian Keluarga

Kemandirian keluarga adalah kunci penurunan stunting untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dalam mengatasi masalah angka stunting. Peran aktif keluarga dalam mengubah rutinitas harian yang bertujuan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat. Tingkat kemandirian keluarga di Kecamatan Brebes belum memiliki kesadaran penuh terhadap kesehatan dan gizi, hal ini dibuktikan dengan adanya orang tua tidak sadar akan pentingnya gizi untuk anak justru memberikan teh kepada

anak sebagai pengganti susu dan membiarkan anak jajan sembarangan yang mengandung bahan kimia.

Dalam hal ini Kecamatan Brebes memberikan akses pelayanan kesehatan yang memadai agar dapat membantu semua kalangan juga penting karena akses pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak fundamental bagi setiap masyarakat, terutama bagi yang tidak mampu. Masyarakat di Kecamatan Brebes yang tidak mampu sering terkendala pada akses layanan kesehatan biaya pengobatan dan perawatan yang tinggi serta sering mengabaikan himbauan untuk hadir ke posyandu dikarenakan memilih tetap bekerja.

2. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Program ini berfokus pada penanggulangan stunting dengan menjalankan pola hidup sehat. Bentuk kegiatannya seperti aktivitas fisik, makan buah dan sayur, dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan lain sebagainya. Salah satu kegiatan Germas adalah fasilitas sanitasi yang layak, di Kecamatan Brebes masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak sendiri, karena sanitasi yang tidak layak menjadi salah satu penyebab munculnya risiko stunting. Lingkungan rumah yang minim cahaya memiliki

pengaruh terhadap produktifitas penghuninya karena tubuh yang sehat memerlukan vitamin D dari sinar matahari. Beberapa rumah penderita stunting di Kecamatan Brebes memiliki kondisi pencayaan kurang.

Memakan buah dan sayur bagi keluarga yang tidak mampu pemerintah daerah memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mendorong gaya hidup sehat sehingga dapat mengurangi beban penyakit. Namun, seringkali bantuan yang diberikan tidak dikonsumsi oleh sasaran dikarenakan anak tersebut memiliki alergi terhadap susu atau makanan lainnya, bahkan akibat pola asuh orang tua anak lebih menyukai makanan siap saji. Dalam beberapa kasus juga PMT yang diberikan kepada sasaran tidak hanya dikonsumsi oleh anak tersebut tetapi juga teman sepermainannya yang sehat.

Edukasi untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat di Kecamatan Brebes melalui kegiatan posyandu sudah terlaksana dengan baik kegiatan edukasi dilakukan dengan memberikan informasi tata cara cuci tangan yang benar, membersihkan rumah dari sampah dan jentik-jentik dan membuat makanan sehat dan bergizi yang praktis.

3. Gerakan Seribu Kehidupan (HPK)

Kegiatan ini berfokus pada 1000 hari pertama kehidupan, termasuk 270 hari selama kehamilan dan 730 hari setelah melahirkan hingga dua tahun. Gizi buruk pemicu stunting terjadi akibat kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi pada Seribu Hari Pertama Kehidupan, sehingga dapat mempengaruhi masa perkembangan dan pertumbuhan anak di masa mendatang.

Solusi dari permasalahan ini memerlukan komitmen pemerintah daerah, Kecamatan Brebes sudah melaksanakan seribu hari pertama kehidupan melalui kerjasama dengan ODP maupun lembaga non pemerintah ditunjukkan berkat tersedianya e-Stunting, sebuah dashboard interaktif yang menyajikan informasi terperinci tentang perkembangan stunting di Kabupaten Brebes.

Komunikasi dan pemberian informasi juga mempengaruhi dalam memberikan edukasi dan mendampingi ibu hamil dan menyusui dalam menjalani praktik gizi yang baik selama Seribu Hari Pertama Kehidupan melalui kegiatan kelas ibu hamil. Kader yang bertugas dalam membantu tenaga kesehatan untuk melakukan penyuluhan adalah Tim Pendamping Keluarga (TPK). Mereka dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang nutrisi yang

seimbang dan pentingnya pemberian ASI eksklusif.

Pemberian penghargaan bagi yang berhasil menurunkan angka stunting merupakan langkah penting dalam mendorong partisipasi aktif dan berkelanjutan dalam program kesehatan. bentuk penghargaan, baik material maupun non-material, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terus memperbaiki kualitas gizi dan kesehatan anak-anak mereka. Penghargaan yang diberikan berupa piagam agar dapat mendorong motivasi dan inovasi dalam pendekatan dan strategi untuk mengatasi stunting.

4. Edukasi Gizi

Pemahaman orang tua tentang pendidikan gizi bervariasi tergantung pada faktor termasuk status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan ketersediaan informasi. Orang tua dengan latar belakang sosial ekonomi yang baik cenderung memiliki akses baik ke makanan bergizi, anak-anak yang mendapatkan gizi seimbang memiliki pertumbuhan fisik yang lebih baik.

Edukasi gizi yang dilakukan di Kecamatan Brebes melalui penyuluhan secara tatap muka di posyandu atau puskesmas tentang pola makan seimbang, pemberian ASI eksklusif, dan makanan pendamping merupakan beberapa topik yang dibahas dalam penyuluhan.

Meskipun demikian, hasil wawancara masyarakat menunjukkan bahwa sebagian orang tua balita yang mengalami stunting masih belum mengetahui pentingnya menyediakan pola makan sehat bagi anak-anak mereka. Oleh sebab itu, pemerintah Kecamatan Brebes melakukan pencerdasan kepada masyarakat dengan melatih kader dan tenaga kesehatan untuk dapat berbagi pengetahuan dengan masyarakat khususnya ibu hamil dan menyusui tentang gizi dan kesehatan.

Ibu hamil, ibu menyusui diberikan penyuluhan gizi oleh Tim TPK Kecamatan Brebes



Sumber : Dokumentasi dari anggota TPK Kecamatan Brebes

Praktik edukasi gizi yang dilakukan berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT), suplemen dan vitamin kepada anak. Kemudian, tenaga kesehatan setempat juga memberikan edukasi dalam bentuk poster yang diletakkan di posyandu terkait makanan bergizi tersebut dikenal dengan nama 4 bintang, yang terdiri dari sayuran, makanan pokok, lauk-pauk dan buah-buahan.

B. Analisis Faktor Pemnghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kecamatan Brebes

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Tujuan kebijakan penanggulangan stunting adalah untuk mengurangi atau menghilangkan masalah stunting itu sendiri. Kebijakan penanggulangan stunting di Kecamatan Brebes berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting. Sasaran dari kebijakan ini adalah ibu hamil yang mana sebagai bentuk upaya untuk mengatasi permasalahan stunting yang sedang terjadi. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menasar remaja putri sebagai sasaran pertamanya. Kedua regulasi tersebut memiliki tujuan yang sama namun berbeda pada sasaran awalnya.

Terdapat aksi bersama dalam penanggulangan stunting mencakup koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga non pemerintah, sektor swasta, akademisi dan masyarakat. Aksi bersama yang dilakukan seperti, melakukan koordinasi antar lembaga, kolaborasi dengan lintas sektor, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, salah satu program unggulan

yaitu melalui program Gerakan Atasi Stunting Peduli Donor Telur (Gaspol) dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), pemerintah daerah melaksanakan inisiatif aksi terkoordinasi untuk mencegah stunting.

Implementasi kebijakan penanggulangan stunting, tentu programnya tidak akan berjalan mulus jika hanya dengan sekali penerapan maka pasti ada hambatan-hambatan yang harus di evaluasi. Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kecamatan Brebes mengalami kendala dalam memperoleh data yang menyangkut penerima bantuan PMT, jumlah data penerima yang tidak sama dengan fakta dilapangan akibat adanya perpindahan penduduk dan tidak pembaruan data dapat menghambat keberhasilan program tersebut.

Hambatan lain yang menjadi keluhan dari masyarakat adalah kurangnya variasi dari PMT yang diberikan hal ini menyebabkan rasa bosan sehingga anak-anak tersebut tidak megunsimsi PMT dengan rutin. Selain itu, Kecamatan Brebes yang terdiri dari 5 kelurahan dan 18 desa akan tetapi anggaran penurunan stunting di setiap desa menggunakan APBDes maka ada 5 kelurahan yang tidak memperoleh bantuan APBDes yaitu Kelurahan Brebes, Kelurahan Gandasuli,

Kelurahan Limbang Kulon, Kelurahan Limbang Wetan, dan Kelurahan Pasarbatang.

2. Sumber Daya

Mengenai aspek sumber daya, terdapat tiga jenis sumber daya yang akan dianalisis, yakni sumber daya manusia, fasilitas, serta anggaran. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan kebijakan terkait penanggulangan stunting stunting di Kecamatan Brebes yang mana kualitas implementor seperti bidan di Kecamatan Brebes sudah bagus dari segi pemahaman dan cara memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun, dengan jumlah implementor tersebut tidak berbanding lurus dengan luasnya wilayah dan banyaknya penduduk disetiap desa.

Di tingkat kabupaten untuk fasilitas kesehatan Dimulai dari jenis puskesmas yang terdiri dari 38 puskesmas rawat inap dan 23 puskesmas rawat jalan, fasilitas kesehatan sudah lengkap. Meski demikian, rasio puskesmas per penduduk hanya 1:53.722 rasio ini masih jauh dari target yang seharusnya 1:30.000 penduduk. Fasilitas kesehatan yang memadai dengan peralatan medis dan tenaga kesehatan terlatih untuk memberikan layanan kesehatan seperti pemeriksaan gizi, imunisasi dan perawatan medis.

Sumber daya keuangan juga merupakan komponen penting yang

mendukung berbagai program stunting berjalan. Anggaran dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting masih belum mencukupi karena terdapat 5 kelurahan yang tidak memiliki APBDes sehingga tidak memiliki alokasi dana khusus dari APBDes untuk disalurkan ke program stunting.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Koordinasi dan komunikasi yang efektif di antara para pelaksana kebijakan dapat menghasilkan kejelasan dalam standar dan tujuan kebijakan. dalam hal ini Pemerintah Desa dilibatkan untuk melaksanakan sosialisasi mengenai stunting dengan diskusi bersama para kader melalui kegiatan Mini Lokarya. Untuk kebijakan penanggulangan stunting, koordinasi dan komunikasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah.

Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai wadah dalam menyatukan seluruh pihak yang terlibat dalam penurunan stunting untuk bekolaborasi aktif melalui komunikasi yang bersifat terbuka dan informatif. Koordinasi penanggulangan stunting di Kecamatan Brebes menunjukkan upaya yang signifikan dalam mengatasi masalah malnutrisi pada anak. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, puskesmas, dan organisasi masyarakat, berbagai program

telah diimplementasikan, termasuk penyuluhan gizi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan PMT.

Di Kecamatan Brebes aktor dalam pelaksana kebijakan biasanya dilatih dengan tujuan agar dapat meningkatkan skill dan pemahaman mereka dalam memeberikan edukasi kepada masyarakat. Dinas kesehatan yang berperan mengimplementasikan program-program kesehatan seperti penyuluhan gizi, dan penyuluhan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui. Dinas pendidikan dan kebudayaan berperan pada pendidikan dan pembentukan pola pikir anak serta keluarga mengenai pentingnya gizi. Lembaga non pemerintah itu ada Tanoto Foundaion, Hotel Grandian, Perias pengantin, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya juga berperan sebagai penyedia makanan, dana bahkan edukasi yang dilakukan untuk para calon pengantin.

Implementasi tidak akan terlaksana tanpa adanya agen pelaksana, di Kecamatan Brebes agen pelaksana merupakan seorang implementor yang harus memberikan contoh, meskipun dalam kebijakannya tidak terdapat aturan khusus untuk implementor harus memiliki nilai tertentu. Dari Pemerintah Kecamatan Brebes sendiri mengedepankan untuk pentingnya tanggung jawab, empati dan

kepekaan akan masalah kesehatan serta sosial.

Keterlibatan aktor-aktor dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting melibatkan berbagai pihak memiliki peran. Setiap aktor memiliki keahlian dan sumber daya yang berbeda-beda, dengan kapasitas pelaksanaan program dapat diperkuat.

5. Sikap Pelaksana

Di Kecamatan Brebes, sikap yang diberikan pelaksana berupa respon yang menilai akan kebijakan yang dilaksanakan, dengan dukungan dalam upaya penurunan angka stunting. Pemerintah Kecamatan Brebes menyampaikan bahwa regulasi yang berdasarkan ibu hamil dan menyusui menjadi kelompok sasaran dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang penanggulangan stunting, ini sedikit berbeda dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penanggulangan stunting yang menasar remaja. Maka dari itu, pemerintah kecamatan berharap adanya perbaikan dikarenakan kebijakan tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan kebijakan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi lingkungan sosial dapat dilihat dari partisipasi masyarakat Kecamatan Brebes masih belum memenuhi target kunjungan dari balita ke posyandu

yang masih berjumlah sekitar 80% dan ini masih belum memenuhi target yang dijadikan parameter oleh para pemangku kebijakan.

Kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan data badan pusat statistik Kabupaten Brebes termasuk 5 besar tercatat sebagai daerah termiskin di Jawa Tengah, hal ini di mempengaruhi tingkat pendapatan dan kondisi sumber daya alam air sebagai kebutuhan dasar manusia dan sumber bagi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani. di Kecamatan Brebes umumnya minum air galon isi ulang, sedangkan untuk daerah yang tidak memiliki akses air bersih, mereka memperoleh air sumur yang kualitas airnya perlu dipertanyakan karena dapat menjadi salah satu risiko terjadinya stunting.

Kondisi dari elite politik dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kecamatan Brebes mampu memperluas jangkauan program dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di seluruh sektor. Dukungan elite politik terhadap kebijakan penanggulangan stunting di Kecamatan Brebes sangat kuat dan komprehensif, ada partisipasi aktif mulai dari bupati, wakil bupati hingga jajarannya perencanaan program melalui pelaksanaan dan evaluasi untuk memastikan keberhasilannya.

Dukungan dari pemerintah saja tentu tidak menjamin keberhasilan kebijakan stunting terlaksana dengan maksimal perlu adanya peran keluarga sebagai tingkat paling dasar struktur sosial dalam mendukung kebutuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan anak. Keluarga di Kecamatan Brebes belum sepenuhnya berperan secara maksimal dalam menjamin tumbuh kembang anaknya, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya upaya lebih bagi orang tua dari anak yang penderita stunting dalam membujuk atau mencari alternatif untuk anak yang alergi dengan makanan tertentu agar nutrisi anak tersebut dapat terpenuhi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa di Kecamatan Brebes, implementasi kebijakan penanggulangan stunting telah melibatkan banyak pemangku kepentingan dan melalui beberapa tahapan penting, termasuk organisasi pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat selaku sasaran. Kebijakan ini dirancang untuk menurunkan prevalensi stunting melalui program yang ada dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 50 Tahun 2019 walaupun terdapat sedikit perbedaan dengan Peraturan Presiden Nomor 72

Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Di Kecamatan Brebes prevalensi diturunkan melalui intervensi gizi, peningkatan layanan kesehatan, dan edukasi kepada masyarakat, menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Adanya kolaborasi dengan pihak swasta dan LSM dapat memperkuat upaya penanggulangan stunting dengan memberikan dukungan sumber daya finansial kepada masyarakat.

Para agen pelaksana dari implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik dan didukung oleh komunikasi yang efektif menunjukkan bahwa koordinasi yang solid dan komunikasi yang lancar di antara para pemangku kepentingan menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan kebijakan ini. Melalui sinergi yang baik antara agen pelaksana dan keterlibatan masyarakat, untuk menurunkan angka stunting dapat dilakukan secara lebih optimal, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai dengan lebih cepat dan efektif.

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, beberapa hambatan masih menjadi penghalang dalam implementasi kebijakan ini. Di antaranya dalam perolehan batuan PMT data sasaran tidak sama dengan fakta dilapangan,

keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan, Lingkungan rumah beberapa rumah yang mempunyai kondisi pencahayaan yang kurang sehingga udara sekitarnya menjadi lembab, dan ini pemicu risiko terjadinya stunting. PMT yang kurang bervariasi menimbulkan kejenuhan anak terhadap makanan yang diberikan dan Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya kesehatan gizi bagi anak untuk mencegah terjadinya stunting.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat di setiap desa. Mengingat kondisi keluarga yang dapat berubah dalam jangka waktu tertentu, pemerintah tidak bisa mengandalkan data yang telah digunakan tahun sebelumnya.
2. Menfokuskan dana yang ada pada program inti yang memiliki dampak langsung pada penurunan stunting, sehingga OPD mempunyai alokasi anggaran yang memadai untuk meminimalisir dampak tersebut, kemudian mengajukan proposal untuk mendapatkan hibah dari lembaga terkait.
3. Melakukan kerjasama yang melibatkan masyarakat melalui gotong royong untuk berfokus pada perbaikan rumah yang

kurang pencahayaan dan pengurangan kelembapan untuk mendukung penanganan stunting.

4. Melakukan sistem menu rotasi dengan memanfaatkan bahan makanan lokal yang mudah didapat dan kaya akan nutrisi.
5. Membangun pendekatan personal ini memungkinkan dialog lebih intim dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan penolakan atau ketidaktahuan. Kemudian menyebarkan cerita atau testimoni dari keluarga yang berhasil menangani stunting setelah mengikuti program posyandu dan pola hidup sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting
- BPS Kabupaten Brebes. (2023). Kabupaten Brebes Dalam Angka Dalam Angka Brebes Regency In Figures 2023. BPS Kabupaten Brebes, No: 33290.2309, 1–389. <https://brebeskab.bps.go.id/>
- Keban, Y. T. (2014). Teori Administrasi Publik. Rineka Cipta

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Bakari, L., Antu, Y., & Katili, A. Y. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Dan Implikasinya Bagi Kemadirian Kesehatan Di Kabupaten Bone Bolango. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia (Vol. 10, Issue 4). Administrasi dan Pelayanan Publik.
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP, 3(1), 11–21.
- Friska, E., & Putri, D. (2022). Peran Pembangunan Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia: Analisis Indeks Modal Manusia dan Stunting. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 28(1), 34–45.
- Hidayat, A. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 6(2), 524–532.
- Indonesia, K. K. (2022). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) . Jakarta: <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/09fb5b8ccfd088080f2521ff0b4374f.pdf>
- Deviana, J. (2023, Juni 30). Permasalahan Stunting di Indonesia dan Penyelesaiannya. Pontianak: Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpontianak/bacaartikel/16261/Permasalahan-Stunting-di-Indonesia-dan-Penyelesaiannya.html>
- Moh. Iqbal Agung P, S. M. (2024, Februari 07). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Mendorong Gaya Hidup Sehat Di Indonesia. Retrieved from RSUD Brebes: Diakses pada tanggal 03 Maret 2024. <https://rsud.brebeskab.go.id/gerakan-masyarakat-hidup-sehat-germas-mendorong-gaya-hidup-sehat-di-indonesia/>